

KODE ETIK, PELAKSANAAN DAN EFEKTIFITAS PENGAWASANNYA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Kode etik suatu profesi dan pengawasan penerapannya dapat dibicarakan secara normatif, yaitu bertolak dari suatu standar perilaku yang dirumuskan terlebih dulu, untuk kemudian digunakan dalam menilai setiap tindakan profesional pelaku profesi. Ibaratnya, kode etik sebagai rambu-rambu di jalan, dan ada "polisi" yang mengawasi setiap tindakan pemakai jalan. Rambu lalu-lintas yang kadang-kadang bahkan diperlukan untuk keselamatan jiwa toh sering juga dilanggar jika polantas tidak ada yang mengawasi. Karenanya dapat dipahami jika pelanggaran rambu profesi bisa lebih gampang terjadi, selama sikap pelaku dalam menghadapi kode etik profesi sebatas takut kepada "polisi". Ujungnya, karena pengawasan terlalu sulit dilakukan oleh "polisi" yang fungsional, kepada setiap pelaku diminta untuk menjadikan nuraninya masing-masing sebagai "polisi" bagi dirinya sendiri. Padahal, siapakah dalam alam pragmatis kini yang bisa menjawab, apa sih nurani itu sebenarnya?

Efektifitas pengawasan kode etik secara polisional mungkin dapat dilakukan dengan penerapan secara normatif pasal-pasal. Tetapi masih tanda tanya, sejauh mana penghayatan si pelaku atas pasal-pasal itu akan berlangsung jika sang "polisi" sedang tidur. Pasal-pasal tidak berarti banyak, bahkan bisa disalah-gunakan oleh "polisi-polisian". Katakanlah kode off the record yang sudah kehilangan makna, sebab sudah dibebani makna konotatif menjadi "off the record" yang digunakan sebagai langkah preventif untuk menghalangi wartawan mencari realitas. Bukankah setiap off the record perlu dilihat maknanya dengan konteksnya ke dalam sistem interaksi: pers dalam menghadapi kekuasaan yang beroff the record, dan realitas sosial. Apakah seluruh realitas sosial dengan dinamikanya yang berkait, menjadi off the record hanya karenanya dinyatakan sebagai off the record secara sepihak, ataukah informasi yang dimiliki oleh penguasa itu sebagai off the record? Dapatkah wartawan dan penguasa itu membedakan batas realitas sosial dengan informasi? Siapakah penguasa atas realitas sosial? Ini baru satu pasal sebagai ilustrasi, sudah mengundang pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya tidak di dalam pasal itu sendiri, tetapi dari konteks sosialnya.

Dengan kerangka pemikiran di atas, masalah kode etik tidak akan dilihat semata-mata sebagai pasal-pasal yang bersifat normatif. Seluruh kode etik, apakah kode untuk jurnalisme, perusahaan pers, atau periklanan, perlu dilihat konteksnya dengan keberadaan institusi yang menjadi wahana bagi pelaku profesional yang menjalankan kode tersebut. Dengan demikian bisa dikaitkan dengan tema pokok seminar ini, yaitu pemantapan kelembagaan (institusionalisasi) Pers Nasional. Ini artinya selain membicarakan penerapan pasal-pasal oleh pelaku profesi, ada yang juga cukup penting untuk dilihat, yaitu keberadaan institusi pers sebagai wahana bagi profesi dalam sistem sosial kita.

(2)

Profesionalisme dan etika merupakan dua hal yang tak terpisah. Profesionalisme dapat ditandai dengan pola kerja yang bersifat khas, biasa disebut sebagai aspek teknika. Keberadaan kerja ini untuk menjadi suatu institusi dalam sistem sosial bertolak dari semangat yang khas dari pelaku untuk menjalankan teknik itu. Semangat ini dapat disebut

* Disampaikan pada *Seminar Profesionalisme dan Etika dalam Pemantapan Kelembagaan Pers Nasional Menyongsong Era Tinggal Landas*, Serikat Penerbit Surat kabar, Persatuan Wartawan Indonesia dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional 1991, Banjarmasin 10 Februari 1991.

etika, sebagai acuan bagi standar tindakan yang dipandang baik. Dengan begitu suatu profesi selamanya terdiri atas dua aspek, yaitu standar teknik, dan standar etik dalam pelaksanaan teknik tersebut. Teknik tanpa etik tidak akan melahirkan profesionalisme, sebaliknya etik tanpa standar teknik sama saja dengan angan-angan muluk.

Etika berkaitan dengan standar baik-buruk. Hanya perlu diingat bahwa standar ini tidak berada di ruang hampa, selamanya berkonteks, mungkin sosial (politik, ekonomi atau kebudayaan) dengan lingkup lokal atau nasional, atau universal (kemanusiaan). Masalah dalam konteks ini manakala ada kekuasaan yang menentukan standar dan konteks baik-buruk suatu perilaku. Misalnya, kekuasaan menetapkan standar baik-buruk hanya berkonteks politik dan lokal. Sementara pelaku ingin menggunakan konteks kebudayaan dan universal.

Pembicaraan tentang etika dapat pula melalui 2 jalan, yaitu pertama mempertanyakan keberadaan institusional, dan kedua dengan melihat keberadaan individual pelaku profesi. Jika yang pertama bersifat makro dengan pendekatan struktural, maka yang kedua bersifat mikro dengan memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perilaku seseorang.

Jalan lainnya dapat juga dilakukan dengan menitik-beratkan kepada bekerjanya nilai-nilai atas diri seseorang. Ada yang bersifat sosial, yaitu nilai-nilai yang diperoleh dari komunitas (sosialisasi) yang menjadi acuan dan komunitas memiliki daya pemaksa untuk dijalankannya nilai tersebut. Disini pelaku bersifat pasif. Selain itu ada pula nilai yang dipilih oleh individu secara sadar di antara sekian banyak nilai yang tereksposure kepadanya. Nilai ini dipilih dengan kesadaran, bahkan dengan sikap kefilosofatan tertentu. Maka pelaku dapat disebut bersifat aktif.

Baik etika bersifat makro maupun mikro, ataupun nilai bersifat pasif maupun aktif, kesemuanya saling berkaitan, yang satu akan menentukan lainnya.

(3)

Etika makro dapat dikenali dengan melakukan analisis atas keberadaan institusi dalam interaksinya dengan institusi-institusi lainnya sebagai bagian sistem sosial. Peran sosial dari suatu institusi bagi yang menggunakan cara pandang struktural fungsionalisme adalah bertolak dari harapan/ekspektasi (expectation) institusi lain yang berada dalam sistem sosial. Keseimbangan terjadi manakala setiap pihak menjalankan peran yang berkesesuaian dengan ekspektasi pihak lainnya. Pandangan mekanistik atas sistem sosial ini mengabaikan pilihan-pilihan idealisme dari pelaku dalam institusi sosial. Jika sistem sosial sepenuhnya mesin yang dapat direkayasa tentulah keseimbangan dapat tercapai.

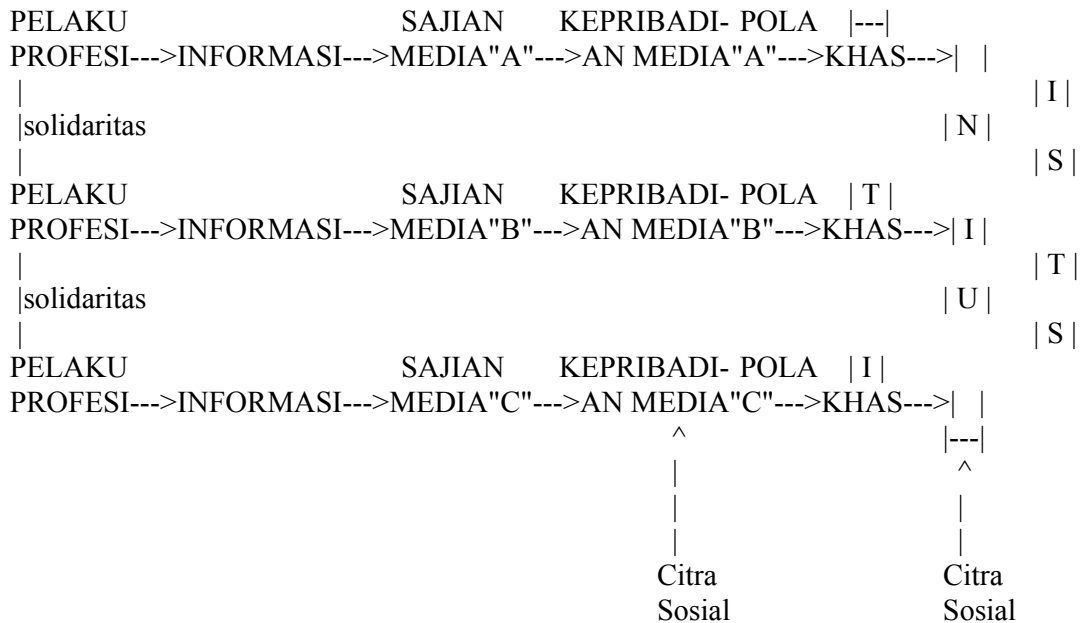
Tetapi kenyataannya peran sosial adalah resultante dari peran yang ditetapkan bagi dirinya sendiri oleh pengelola institusi dengan peran yang menjadi ekspektasi institusi-institusi lainnya. Tarik-menarik dari peran yang ditetapkan sendiri dan ekspektasi pihak luar ini dapat bersifat tegang, jika konsensus atas nilai menjadi acuan bersama tidak tercapai. Atau mungkin juga keseimbangan, tergantung dari konsensus yang terbentuk atas nilai yang menjadi acuan.

Proses mencapai konsensus ini disebut sebagai dialog sosial, dan tentulah mengambil waktu yang sulit untuk ditarget dengan bahasa pembangunan ekonomi. Proses dialog sosial ini biasanya dipandang sebelah mata oleh pihak yang berkuasa, sebab dengan kekuasaan, masyarakat dapat direkayasa yaitu melalui proses mobilisasi.

Mobilisasi tidak memproses masyarakat ke arah konsensus suatu nilai, sebab bertolak dari nilai yang sudah dipastikan dan didukung oleh kekuasaan. Jika pelaku dalam institusi yang direkayasa oleh kekuasaan tidak punya pilihan nilai lain, atau sudah bersikap submisif, tentulah keseimbangan fungsional dapat juga terjadi.

(4)

Jika ditanyakan bagaimana kita memproses kelembagaan pers nasional yang ideal, tentulah melalui pelaku profesi. Format kelembagaan pers kita ditentukan oleh kepribadian media pers, sementara kepribadian ini dikenali melalui sajian informasinya dari hari ke hari. Dengan demikian dapat disederhanakan sebagai berikut:



Ingin ditunjukkan melalui diagram di atas, aspek yang perlu diperhatikan, yaitu profesi-media-dan institusi pers. Kegiatan profesional selamanya memerlukan wahana yang bernama organisasi media, dan institusi pers hanya muncul dalam masyarakat melalui pola khas yang lahir dari keberadaan berbagai media. Pengawasan etika dilakukan oleh organisasi profesi atas diri pelaku profesi, sementara hubungan kerja yang sesungguhnya adalah antara si pelaku organisasi media yang menjadi wahana kerja profesionalnya.

Satu media akan memformat kepribadiannya yang berbeda dari media lainnya. Kepribadian ini lahir dari perilakunya, melalui informasi yang disajikannya yang akan membangun citra sosial (social image). Setiap media memiliki citra tertentu dalam peta kognitif khalayak. Kendati ada perbedaan-perbedaan kepribadian di antara media, tetapi dalam interaksinya dengan berbagai faktor di luar dirinya, akan terdapat pola-pola yang khas, yang akan dikenali sebagai kecenderungan(trend) umum pers dalam suatu masyarakat. Trend inilah yang ditangkap sebagai citra institusi pers.

Karenanya membicarakan pers sebagai institusi sosial hanya dapat dilakukan melalui trend berbagai media terhadap faktor-faktor di luar dirinya di dalam sistem sosial. Sifat interaksi berbagai institusi (di antaranya institusi pers) di dalam sistem sosial. Hubungan institusional ini bersifat empiris, tidak normatif. Karenanya pola khas yang terjadi dalam trend media tidak semata-mata lahir dari pilihan nilai oleh pelaku profesi, tetapi boleh jadi dari ketidak-berdayaan dalam hubungan institusional yang bersifat empiris.

Kesadaran akan keberadaan institusional ini kiranya menjadi pengikat solidaritas profesional. Solidaritas profesional yang kian pudar tak perlu ditangisi, sebab memang bukan salah bunda mengandung. Kita tidak bisa menuntut agar solidaritas akan muncul hanya hanya secara kognitif tentang bagus dan pentingnya solidaritas. Karenanya tidak terelakkan untuk menumbuhkan apresiasi akan keberadaan institusi pers, bukan hanya tentang media tempat kerja sendiri. "Nasib" jatuh-bangunnya institusi pers dalam sistem

sosial menjadi sangat perlu masuk ke dalam kurikulum pelatihan setiap wartawan. Inilah yang menjadi dasar jawaban, mengapa solidaritas profesional itu menjadi penting bagi setiap pelaku profesi jurnalisme.

Apresiasi atas setting sistem sosial ini merupakan dasar penghayatan etika makro. Kesadaran yang berkembang akan etika makro dapat menjadi batu sendi bagi etika mikro. Acuan baik-buruk perilaku individual dalam kerangka kerja profesi dapat ditumbuhkan lebih mendalam sebab pertanyaan-pertanyaan etis diajukan lebih bersifat kontekstual.

(5)

Kembali ingin diingatkan, bahwa kampanye kode etik tidak akan banyak manfaatnya selama masih bersifat mormatif pasal demi pasal. Masalah etika bukan soal tahu atau tidak tahu (kognitif), tetapi lebih ke urusan dihayati dan menjadi dasar bertindak (konatif). Kasus "off the record" yang sangat gampang keluar dari sejumlah pejabat, bisa dilihat sebagai contoh bagaimana pasal kode etik diketahui, tetapi sebenarnya kehilangan makna.

Pertanyaan etis bersifat kontekstual jika sejak awal diperkaitkan dengan aspek teknik kerja profesional. Dengan kata lain, kurikulum pelatihan yang bersifat teknis sekaligus mengandung pertanyaan etis. Jika disadari bahwa setiap aspek teknik kerja profesional selamanya memiliki konteks, maka gugatan etis tidak akan berhenti kepada aspek teknik itu semata. Pertanyaan etis selamanya bersifat mengapa, misalnya mengapa "off the record"? Jawabannya tidak dicari dari pasal kode etik, tetapi dari konteks interaksi: teknik jurnalisme, realitas yang menjadi obyek, dan pihak yang menyatakan "off the record".

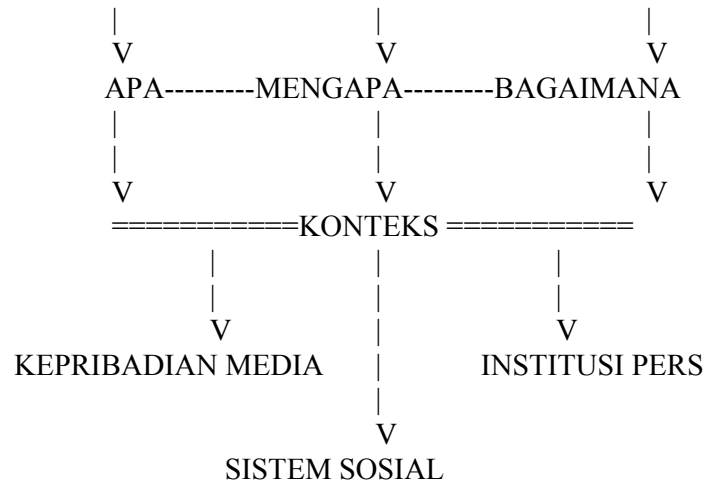
Dengan demikian seluruh aspek teknik jurnalisme dapat dinilai secara etis, dan proses yang berlangsung terus menerus selama pelatihan akan menjadikan nilai etis itu menyatu dalam kerja teknis. Tetapi untuk itu sebelum masuk ke dunia teknis, perlu lebih dulu ditumbuhkan penghayatan atas bahan baku pokok dalam kerja jurnalisme, yaitu realitas sosial. Pemilahan-pemilahan yang tajam dari gradasi realitas yang disebut fiksi sampai fakta, dapat disebut sebagai langkah fundamental dalam pelatihan aspek teknik profesi. Sedang pelatihan menulis hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan teknik profesi yaitu aspek bagaimana (how) memformat realitas menjadi informasi. Masalah yang lebih penting dalam setiap pelatihan adalah apa (what) yang dipilih dan disampaikan sebagai informasi, dan mengapa (why) suatu realitas dipilih dan disampaikan kepada masyarakat dalam format informasi.

Jika kita ingat bahwa profesi jurnalisme pada dasarnya bersifat terbuka, artinya tidak ada sekolah tinggi yang khusus menyiapkan lulusannya pada tahap profesi untuk kerja jurnalisme, rekrutmen dilakukan terhadap lulusan perguruan tinggi dengan disiplin keilmuan yang beraneka macam. Disiplin keilmuan selamanya memberikan pelatihan yang bertujuan untuk memformat lulusannya dalam melihat persoalan dan memberikan penguasaan domain pengetahuan tertentu. Karenanya setiap disiplin keilmuan sebenarnya memformat lulusannya dengan tujuan yang berbeda-beda. Maka media yang merekrut beraneka lulusan perguruan tinggi itu perlu menyiapkan pelaku profesi yang bekerja di organisasinya dalam format yang sesuai dengan standar profesi.

Penghayatan etis dapat dikembangkan dengan bertitik tolak dari pelatihan teknik dengan bertumpu kepada poros realitas dan informasi dengan seluruh konteksnya. Secara sederhana dapat diskemakan sebagai berikut:

REALITAS=====INFORMASI

| | |



Kerangka pemikiran di atas dapat dikembangkan dalam proses pelatihan wartawan pada tingkat pemula. Litbang organisasi media yang biasa merekrut lulusan perguruan tinggi tanpa menuntut standar profesi, kiranya perlu menyusun sistem pelatihan yang dapat mencakup seluruh aspek teknik dan etik yang dapat dihayati secara kontekstual. Untuk itu memang perlu diasumsikan lebih dulu, bahwa personel jurnalistik bukan sekadar tukang, tetapi kaum profesional. Dan karena yang diurusnya adalah masalah-masalah sekitar poros realitas - informasi yang berkonteks dalam sistem sosial, bukankah pelaku profesi ini dapat disebut kaum intelektual? Tetapi untuk itu tantangannya memang besar, seiring dengan krisis intelektualisme di negeri kita. ***
